



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI ASTUTI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 128565

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/48 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/210 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Bangunan Seluas 25 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/390 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 325.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 342.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 155.436.360

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.022.436.360

III. HUTANG Rp. 639.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.383.436.360



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.